

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 1 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 13 Tahun 1974 jo. Keppres No. 81 Tahun 1982; Keppres No. 40 Tahun 1974; Perpres No. 36 Tahun 2005; Perpres 70 Tahun 2012; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
3. Perencanaan dan Pengadaan
4. Penerimaan dan Penyaluran
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan Pemeliharaan
7. Penilaian
8. Penghapusan
9. Pemindahtanganan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan;
12. Ketentuan Lain-Lain;
13. Tuntutan Ganti Rugi;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- Diundangkan di Lasusua pada tanggal 18 Maret 2013.

PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PERDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 5 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan bila diterapkan akan menimbulkan kenaikan yang cukup besar disbanding dengan tahun sebelumnya, kenaikan tarif pajak ini akan menjadi beban yang memberatkan bagi wajib pajak sehingga perlu diadakan perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; U No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;
- Diundangkan pada tanggal 12 Desember 2013.

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA**

PERDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 10 TAHUN 2013

2013

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Prinsip Penyertaan Modal;
4. Bentuk Penyertaan Modal Daerah;
5. Besaran Penyertaan Modal Daerah;
6. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Pemeriksaan;
9. Hasil Usaha;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Lasusua pada tanggal 12 Desember 2013

BANGUNAN GEDUNG

PERDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : bahwa penyelenggaraan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;

bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung diatur dengan peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Bangunan Gedung;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan
3. Bangunan Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5. Garis Sempadan
6. Peran Serta Masyarakat
7. Perizinan Bangunan Gedung
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2013.

**SISTEM KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
PERDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 11 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

ABSTRAK : Bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kabupaten seutuhnya, sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Bentuk Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Partisipasi Masyarakat;
5. Bentuk Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Desa Terpencil;
7. Hak dan Kewajiban Pemerintah;
8. Bentuk Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan;
9. Sistem Manajemen dan Informasi Kesehatan;
10. Ketentuan Sanksi;
11. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku paling lambat enam bulan setelah ditetapkan;
- Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 12 Desember 2013.